HAK KEBEBESAN DALAM BERPENDAPAT DI ZAMAN SERBA DIGITAL

Muhammad Maftukh

IlK Strada Indonesia

mmaftu17@gmail.com

ABSTRACT

Democracy in the Indonesian government system has an impact on equal rights, obligations and equal treatment of all citizens. Freedom of expression in general is a right that is owned by every individual guaranteed by the constitution, this is stated in Article 28E paragraph (3). Advances in technology and information is one of the forums in the delivery of opinions by the people in Indonesia. Communication technology on various kinds of social media has been given the freedom for each individual to express his opinion on various types of communication social media. The development of information technology media is colored by many problems. Restrictions on human rights in various aspects are a form of control to avoid brutal and excessive freedom.

Keywords : Democracy, Freedom of speech, Social Media

ABSTRAK

Demokrasi pada sistem pemerintahan Indonesia memberikan dampak pada persamaan hak, kewajiban dan perlakuan yang rata pada semua warga negaranya. Kebebasan berpendapat pada umumnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini tercantum pada Pasal 28E ayat (3). Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat di Indonesia. Teknologi komunikasi pada berbagai macam media sosial telah diberikan kebebasan untuk tiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya pada berbagai jenis media sosial komunikasi. Perkembangan media teknologi informasi diwarnai banyak permasalahan. Pembatasan HAM pada berbagai aspek merupakan bentuk kontrol terhindarnya kebebasan yang brutal dan melampaui batas.

Kata Kunci : Demokrasi, Kebebasan berpendapat, Media Sosial

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara di berikan kebebasan berpendapat, di Negara Indonesia sendiri kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang telah di jamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan teknologi khususnya dalam media elektronik telah memfasilitasi manusia dalam memberikan kemudahan berkomunikasi dan menyampaikan pendapat.

Perkembangan tersebut menghasilkan komunikasi dalam era teknologi yang memiliki, cakupan yang luas tidak harus bertemu searah langsung untuk berbicara tetapi dapat melalui sarana komunikasi yang ada. Perkembangan manusia yang sangat akrab dengan internet dimana media sosial termasuk di dalamnya dan dapat diakses dengan menggunakan gadget telah 2 menghasilkan dinamika baru dalam lingkup komunikasi di masyarakat salah satunya adalah teknologi yang memberikan pengaruh terhadap hadirnya keragaman media.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kaum millenial pada saat ini, banyak sekali fakta yang menggambarkan bahwa perilaku pengguna internet dalam mengemukakan pendapat di sosial media seringkali kebablasan dalam berpendapat atau berkomentar di sosial media. Sehingga, pendapat di sosial media tersebut menimbulkan masalah, baik merugikan orang lain

maupun melakukan tindak pidana dan melanggar hukum. Penggunaan media sosial dengan kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan kaidah, norma dan ketentuan hukum yang berlaku serta menimbulkan masalah. Salah satunya adalah kasus Florence Sihombing yang mengungkapkan pendapat berupa kekesalannya terhadap warga Yogyakarta via Path.

Dilansir dari News Entertainment, Florence Sihombing merupakan mahasiswa S-2 Universitas Gajah Mada yang berurusan dengan kepolisian, setelah kicaumannya di media sosial "Path" tersebar ke penjuru Indonesia. Lalu, membangkitkan amarah kota yang disebutkan dalam kicauan kontroversialnya, Florence bersama kendaraan roda duanya bermaksud mengisi bensin di salah satu SPBU di Yogyakarta. Ia masuk ke antrian yang salah, tidak dilayani, lalu ia mengungkapkan kekesalannya lewat media sosial (<https://www.fimela.com/news-entertainmentread/3511310/kasus-florence-kontroversi-uu-ite-vs-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial>).

Lalu, seseorang di jaring pertemanan Path Florence meng-screen capture status tersebut dan membagikannya ke jejaring sosial. Screen capture itu menyebar ke berbagai akun media sosial, memecut emosi siapapun yang merasa Florence sudah menjelek-jelekkan Yogyakarta. Kasus ini kemudian bergulir semakin jauh, seiring pihak-pihak tertentu malah mengikutsertakan latar belakang asal usul Florence sehingga isu ras terbawa. Florence dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, permasalahan yang menimbulkan kontroversi dalam penggunaan sosial media yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat adalah kasus penyebaran hoax oleh Deny Siregar.

Dilansir dari berita Republika.co.id Deny Siregar yang menyebarkan kabar bahwa ambulans berlogo DKI Jakarta 4 membawa batu pada saat demonstrasi. Deny Siregar, pria kelahiran 3

Oktober 1973 ini adalah pegiat sosial media dan ia lebih dikenal oleh orang yang sangat aktif dan sering berselancar di sosial media. Adapun cuitan Denny Siregar tersebut adalah: "Hasil pantauan malam ini.. Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta," tulis Denny melalui akun Twitter @dennysiregar7 (Sc: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pyj45b322> diakses pada 20 februari 2020. 19.30 WIB).

Denny yang pendukung Jokowi kemudian dikritik netizen karena menyebarkan hoaks. Denny pun kemudian menghapus cuitan itu dengan dalih "demi menjaga marwah Pemprov DKI dan PMI." Faktanya, batu-batu itu dibawa perusuh yang melarikan diri dan bersembunyi dalam ambulans, bukan petugas ambulans yang membawa batu-batu tersebut. Namun, polisi tidak memproses Denny. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono berdalih bahwa memang "ada batu di dalam mobil ambulans". Dari beberapa kasus kebebasan berpendapat di atas, pada saat ini dalam menyampaikan pendapat, khususnya di dalam sosial media seringkali melanggar kaidah-kaidah yang ada dan bertentangan dalam kehidupan bermasyarakat. Akun-akun anonim (tidak diketahui) seringkali berkomentar dan berpendapat sehingga sulit untuk mengungkap identitas pelaku.

2. Kasus/Masalah

Bagaimana cara mengekspresikan dalam berpendapat di jaman yang serba digital ini ?

Bagaimana agar mudah berpendapat dan tidak termakan hoax ?

Bagaimana perlindungan hukum dalam kebebasan berpendapat ?

3. Tinjauan Pustaka

Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan

tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan akan memberikan dampak pada anggota masyarakat harus terus ditanamkan. Kekuatan akan rasa tanggungjawab memberikan implikasi atas kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan.

Salah satu hak yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Diakui bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) salah satu ciri negara demokrasi. Sebuah negara dapat dikatakan menganut konsep negara demokrasi ketika mereka memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum baik itu secara lisan maupun tulisan. 2 Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat. John Locke, dalam karyanya *The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration*, mengemukakan bahwasanya setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang dikaruniakan kepadanya, kebebasan kepemilikan yang tidak lain adalah milik mereka sendiri dan tidak dapat dikurangi ataupun diambil oleh negara.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, untuk memiliki. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok. Konsep HAM dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Pasal 28F "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia." Tidak

hanya sampai disitu, dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 14 ayat 1 dan 2 juga memuat aturan tentang hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan berkomunikasi serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, dan menyampaikan informasi dengan memanfaatkan segala jenis sarana yang ada. Pengakuan mengenai hak dalam menyampaikan dan memperoleh pendapat atau informasi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (international covenant on civil and political rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (internasional covenant on civil and political rights) yang telah diratifikasi atau disahkan melalui undang-undang.

Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan negara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan HAM merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. Maka dengan ini kebebasan dalam berpendapat merupakan fungsi yang penting dalam ranah demokrasi. HAM memiliki sifat dasar membatasi kekuasaan pemerintahan, namun disisi lain pemerintah diberikan wewenang untuk membatasi hak dasar dengan fungsi pengendaliannya (Sturing). Dengan demikian hak dasar mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat memiliki hak demokrasi dan kebebasan.

Aturan tentang kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia memang terbatas, selama ini payung hukum mengenai kebebasan berpendapat hanya diatur dalam Undang-Undang

No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam Undang-Undang tersebut sebagian besar hanya membahas tentang Pers Cetak. Dikarenakan Undang-Undang tersebut yang belum akomodatif maka dapat dikatakan bahwa media online di Indonesia belum memiliki payung hukum terkait kebebasan pers, padahal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan ruh dari kebebasan pers, bebas dalam artian bebas untuk mencari, mengolah dan menulis serta menyampaikan berita melalui media cetak atau elektronik serta media online (internet).

Suatu Negara tidak akan berjalan tanpa ada yang namanya warga Negara maka dari itu hukum yang berada di suatu Negara juga harus menjamin pemenuhan hak-hak setiap warga Negara. Hak yang paling mendasar pada manusia ialah hak asasi manusia. Salah satu dasar hukum yang menagatur tentang Hak Asasi Manusia ialah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 UU no. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan martabat manusia”. Kata “setiap orang” menunjukkan makna bahwa siapapun baik itu pemerintah atau pun warga Negara harus memangku kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dan juga setiap orang berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

Banyak hak yang melekat pada diri manusia, salah satunya adalah hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Landasan hukum yang paling mendasar pemenuhan hak ini ialah Pasal 28 e ayat (3) Bab XA UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat kemudian dipertegas dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum, maka dari itu sudah seharusnya hak kebebasan dalam berpendapat

dilindungi sah secara hukum. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut juga berlaku untuk penyampaian pendapat yang disampaikan melalui media sosial. Dalam hal pembentukan persepsi merupakan suatu hal mendasar yang harus dilakukan untuk menyampaikan pendapatnya di media social dengan mempertimbangkan apa yang akan diutarakan terlebih dahulu.

Indonesia juga sering disebut sebagai Negara demokrasi yang berarti menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hak asasi manusia dengan demokrasi merupakan suatu konsepsi relasi social yang lahir dimasyarakat dunia dan dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan harkat kemanusiaannya. Hak asasi manusia itu lahir dari diri manusia itu sendiri bukan karena diberikan. Didalam masyarakat demokratis itu berarti hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini semakin memperkuat bahwasannya kebebasan di media social memang merupakan hak sipil seorang warga Negara untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka di muka umum.

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR dan berpendapat. "any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law." Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisi propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya

Salah satu hak asasi manusia yang terdapat pada undang-undang dasar 1945 adalah kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 yang menyatakan: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang

-undang. Hal inipun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Menciptakan suasana yang aman, tertib dan damai serta pelaksanaan yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan hal yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. pemerintah yang seharusnya jadi pengayom bagi warga negaranya malah terlihat sering menjadi pihak yang otoriter yang tidak jarang mengakibatkan korban disaat terjadi penyampaian aspirasi di depan publik. Sering terjadi kesalahan penafsiran dalam masyarakat tentang kata kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas bukan berarti bisa seenaknya dalam bertindak, dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dalam menampung aspirasi demonstrasi dan mengawasi ataupun penggunaan sosial media sehingga pemerintah terlihat memiliki peran dalam menghadapi perkembangan zaman.

4. Pembahasan

Aturan tentang kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia memang terbatas, selama ini payung hukum mengenai kebebasan berpendapat hanya diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam Undang-Undang tersebut sebagian besar hanya membahas tentang Pers Cetak. Dikarenakan Undang-Undang tersebut yang belum akomodatif maka dapat dikatakan bahwa media online di Indonesia belum memiliki payung hukum terkait kebebasan pers, padahal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan ruh dari kebebasan pers, bebas dalam artian bebas untuk mencari, mengolah dan menulis serta menyampaikan berita melalui media cetak atau elektronik serta media online (internet).

Disamping sifatnya yang universal, hak-hak tersebut tidak dapat pula dicabut (inalienable). Maka dari itu seseorang yang menerima perbuatan kejam dari orang lain atau orang yang berbuat kejam terhadap orang lain, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-

hak tersebut. Karena tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolute negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya, maka dari itu munculah hak-hak tersebut. Oleh sebab itu, hak-hak generasi pertama itu disebut sebagai hak-hak klasik. Pada hakekatnya hak-hak tersebut hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak untuk hidup, hak memperoleh keutuhan jasmani, hak kebebasan untuk bergerak, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Banyak macam bentuk dalam mengemukakan pendapat salah satunya adalah dengan bentuk tulisan yang disampaikan di media social. Untuk menjamin kebebasan berpendapat di media social yang beriringan dengan terciptanya suasa yang kondusif saat penyampaian tersebut muncullah UU ITE. Undang-undang ini membuat sebagian orang merasa terancam dalam mengekspresikan pendapatnya di media social. Namun, pada dasarnya indonesia sudah dijamin kebebasan berpendapatnya selain dalam pasal bab XA pasal 28 UUD RI 1945 dan UU no. 19 Tahun 1988 juga dalam pasal 27 Ayat 1 UUD RI 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Problematika yang timbul antara UU ITE dan HAM ada pada beberapa point dalam UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membatasi dalam beberapa point, yaitu :

1. Definisi pencemaran nama baik dalam Undang-Undang tersebut tidak jelas.
2. Belum terpenuhinya unsur yang ada dalam syarat kebebasan berpendapat.

3. Tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain.

4. Penggunaan UU ini menerpa seluruh lapisan masyarakat

Sebenarnya Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mumpuni untuk menjamin kebebasan berpendapat warganya karena pada dasarnya kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang harus dilindungi secara hukum. Menyampaikan pendapat dalam bentuk sebuah informasi hanyalah gambaran kecil dalam penegakan demokrasi di Indonesia, dengan menyampaikan pendapat di media social menggambarkan sebuah unjuk rasa dalam bentuk yang berbeda seperti biasanya. Jika seseorang dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum melalui media social yang menggunakan media tersebut dengan bijaksana dan dalam penyampaianya sesuai dengan aturan yang berlaku maka sah dalam hukum. Beriringan dengan hal itu masih saja akan ada ketidak nyamanan yang timbul dikarenakan penyelenggaraan layanan masyarakatnya dinilai kurang responsive sehingga membuat terhambatnya aspirasi yang disampaikan. Dampak dari hal tersebut adalah timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian membuat orang-orang yang tidak percaya tersebut menimbulkan masalah baru dengan menggunakan media sosial atau informasi melalui elektronik dengan sembarangan.

5. Kesimpulan

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental. Kebebasan berpendapat sendiri diatur dalam dalam UUD 1945 pada pasal 28 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan ditetapkan oleh undang-undang”. Kebebasan berpendapat juga diakui secara internasional melalui deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) yang dalam pasal 19 dan 20 disebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”. Kebebasan berpendapat

merupakan hak dasar dari manusia. Namun terkadang kata 'bebas' melahirkan multitafsir di kalangan masyarakat. Bebas bukan berarti bias seenaknya dalam mengemukakan pendapat tapi tetap harus bertanggung jawab dan menjunjung

tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini pula yang menjadi dasar filosofis lahirnya UU ITE. Akan tetapi beberapa problematika kerap kali muncul jika membahas tentang kebebasan berpendapat jika ditinjau dari HAM dan UU IT

Daftar Pustaka

Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3).

Sari, M. A. (2020). *PERILAKU MAHASISWA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI JURUSAN PPKN UNIMED 2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Medan).

Syahri, A. S. (2010). Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 10(1), 26-31.

SEHAT, R. P. D. D. Y. EKSPRESI KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: TELAAH KRITIS RUANG PUBLIK HABERMAS.

MAFTUKH, M. (2021). Pentingnya Toleransi Atau Pluralisme Antar Umat Beragama Untuk Keutuhan NKRI.

MAFTUKH, M. (2021). Kewajiban Negara Terhadap Pemberian Jaminan kesehatan Untuk Masyarakat.

Antari, P. E. D. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Undiknas*, 4(1).

Siyoto, S. , & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.